

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia merupakan salah satu permasalahan pembangunan nasional yang mendesak dan kompleks. Masalah ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat pembangunan, mencakup disparitas dalam distribusi pendapatan, akses terhadap layanan dasar, kualitas infrastruktur, dan kesempatan ekonomi. Ketimpangan ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan inklusif sebagaimana diamanatkan oleh dokumen perencanaan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ketimpangan wilayah tidak hanya terkait dengan isu ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Di Indonesia, ketimpangan ini telah memengaruhi daya saing antarwilayah dan mendorong urbanisasi yang tidak merata. Pulau Jawa, sebagai pusat ekonomi, menarik arus migrasi besar-besaran dari wilayah lain, termasuk Pulau Sumatera. Fenomena ini memperburuk ketimpangan karena sumber daya manusia terampil terkonsentrasi di kota-kota besar di Jawa, sementara wilayah asal mengalami *brain drain*.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi bukanlah satu-satunya tujuan utama inisiatif pembangunan ekonomi, meskipun Pertumbuhan ekonomi salah satu indikator pembangunan ekonomi, namun wajib bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan ketimpangan wilayah. Menurut (Todaro, 2000), kemajuan dalam pembangunan suatu daerah tidak hanya menyangkut bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga pihak mana yang melaksanakannya dan berhak memperoleh manfaatnya.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia mencatat angka sebesar 4,95% pada kuartal ketiga 2024, sedikit melambat dibandingkan kuartal kedua yang mencapai 5,05% (Nangnoy, 2024) Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi wilayah seperti Pulau Jawa, yang menyumbang sekitar 57,89% dari total PDB nasional. Sebaliknya, Pulau Sumatera hanya menyumbang 21,94%, sementara

Kalimantan dan Papua masing-masing berkontribusi sekitar 8,23% dan 2,51%. Dominasi Jawa dalam struktur ekonomi nasional menegaskan bahwa wilayah lain masih tertinggal dalam pembangunan ekonomi yang merata.

Salah satu indikator makro yang mencerminkan ketimpangan wilayah Indonesia adalah *Gini Ratio*, yang pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,379, menurun dari 0,388 pada tahun sebelumnya (BPS, 2024a). Penurunan ini mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan secara nasional. Namun, disparitas antarwilayah tetap signifikan. Wilayah Indonesia bagian barat, seperti Pulau Jawa, mencatat *Gini Ratio* yang lebih rendah dibandingkan wilayah timur, seperti Papua dan Maluku, yang memiliki tingkat ketimpangan lebih tinggi akibat keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi. Hal ini juga tercermin pada tingkat kemiskinan nasional yang mencapai angka terendah sepanjang sejarah Indonesia, yakni 8,57% pada September 2024 (BPS, 2024a)

Namun, distribusi angka ini tidak seragam. Provinsi di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata nasional, sedangkan Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur mencatat tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi, masing-masing sebesar 27,13% dan 20,23% pada 2024 (Luky Alfirman dkk., 2023). Provinsi Lampung, misalnya, mencatat tingkat kemiskinan sebesar 10,21% pada 2023, yang juga berada di atas rata-rata nasional (Statistik, 2024).

Selain itu, disparitas dalam investasi infrastruktur menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk ketimpangan wilayah. Pulau Jawa memiliki keunggulan dalam jaringan transportasi, akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta kemudahan berbisnis. Sebaliknya, wilayah seperti Kalimantan dan Papua menghadapi kendala besar akibat terbatasnya infrastruktur jalan, pelabuhan, dan akses internet. Sebagai ilustrasi, panjang jalan nasional di Pulau Jawa mencapai 47.017 km pada 2023, jauh lebih besar dibandingkan Kalimantan yang hanya memiliki 18.560 km dan Papua yang memiliki 8.973 km (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2024). Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada stabilitas sosial dan politik.

Ketidakpuasan masyarakat di wilayah tertinggal sering kali memicu konflik sosial dan menghambat integrasi nasional.

Kesenjangan dalam sumber daya alam yang tersedia serta keadaan demografi di setiap daerah berkontribusi terhadap ketimpangan regional, yang merupakan ciri umum kegiatan ekonomi regional. Kapasitas suatu kawasan untuk menggerakkan proses pembangunan dengan cara yang berbeda-beda akibat jurang perbedaan tersebut (Dhyatmika & Atmanti, 2013). Dengan demikian, terdapat daerah maju dan tertinggal di setiap daerah (Sjafrizal, 2012). Menurut (Kuncoro, 2002), pelaksanaan kemajuan ekonomi dibarengi dengan munculnya kesenjangan antar wilayah. Perkembangan dan kemajuan ekonomi tidak terjadi dalam pola yang seragam serta bersamaan di setiap tempat sehingga menimbulkan ketimpangan.

Jika kita menelaah lebih jauh perbandingan pembangunan regional dengan daerah dengan menggunakan pemeringkatan *Inclusive Development Index* (IDI) yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) pada tahun 2018, kita dapat melihat bahwa isu disparitas wilayah juga ada kaitannya dengan isu ketidakseimbangan ekonomi & pemerataan pembangunan. *World Economic Forum* (WEF) sering menilai negara-negara berkembang menunjukkan pembangunan yang lebih besar dan pemerataan kesejahteraan warganya. Thailand menduduki peringkat ke-13, sementara Malaysia di peringkat ke-17, sementara Indonesia terletak di peringkat ke-36 dari 77 negara berkembang hal ini dilansir dari Indeks Pembangunan Berkeadilan.

Dari sisi perbandingan internasional, kesenjangan antara Pulau Sumatera dan negara maju seperti Singapura mencerminkan perbedaan besar dalam aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Singapura memiliki pendapatan per kapita sekitar \$72.000 per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan Sumatera yang berkisar antara \$2.700–\$7.500. Perekonomian Singapura berbasis sektor tersier, seperti keuangan dan teknologi, sedangkan Sumatera bergantung pada sektor primer, seperti perkebunan dan pertambangan. Infrastruktur di Singapura juga jauh lebih maju, dengan fasilitas transportasi modern seperti MRT, sementara Sumatera masih berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur

melalui proyek seperti Tol Trans Sumatera. Dalam hal sosial, Singapura memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi, didukung oleh layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Sebaliknya, kesenjangan sosial di Sumatera masih signifikan, dengan beberapa provinsi seperti Aceh dan Jambi tertinggal dibandingkan Sumatera Barat.

Isu konektivitas juga menjadi salah satu fokus penting dalam upaya pengurangan ketimpangan. Dalam laporan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2024), disebutkan bahwa proyek infrastruktur strategis, seperti Tol Trans Sumatera, bertujuan meningkatkan aksesibilitas antarprovinsi. Namun, keberhasilan proyek ini memerlukan dukungan dari infrastruktur pendukung lainnya, seperti pelabuhan dan jaringan internet. Saat ini, penetrasi internet di Sumatera baru mencapai 70%, jauh di bawah Singapura yang hampir mencapai 100% (Conference, n.d.).

Dalam konteks global, perbandingan antara Sumatera dan Singapura menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Singapura telah berhasil memanfaatkan sumber daya manusianya secara optimal melalui investasi di sektor pendidikan dan teknologi. Di sisi lain, Sumatera masih berjuang dengan eksploitasi sumber daya alam yang sering kali tidak berkelanjutan. Deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan tambang batubara menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan di wilayah ini. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang lebih tegas untuk mengurangi dampak negatif eksploitasi sumber daya alam, seperti melalui program reboisasi dan pengurangan emisi karbon.

Di Indonesia, pemerintah daerah merupakan pembuat kebijakan yang memiliki peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya sebagai masukan bagi pembangunan daerah (Li & Wei, 2010). Pada kenyataannya, pengelolaan sumber daya yang ada melalui pembangunan daerah memerlukan kerja sama dan koordinasi antara masyarakat lokal dan pemerintah daerah. Demi mendorong pertumbuhan ekonomi & menghasilkan lapangan kerja baru,

pemerintah daerah dan masyarakatnya dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan membentuk pola kemitraan (Kuncoro, 2004).

Masalah ketimpangan wilayah terjadi dari Kawasan barat sampai Kawasan timur Indonesia. Ketimpangan ini tidak hanya tampak pada sentra perekonomian Indonesia yakni Pulau Jawa, namun juga terjadi di pulau besar lainnya seperti Sumatera. Sepuluh provinsi yang membentuk Pulau Sumatera, satu diantara pulau-pulau terbesar di Indonesia, adalah Provinsi Aceh (NAD), Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Kepulauan Riau (Kepri), Sumatera Selatan (Sumsel), Bangka Belitung (Babel), Bengkulu, Jambi, & Lampung. Pulau Sumatera, sebagai salah satu wilayah utama di Indonesia, memiliki karakteristik ketimpangan pembangunan yang mencerminkan tantangan yang dihadapi di tingkat nasional. Dengan luas wilayah 473.481 km² dan populasi sekitar 21,68% dari total penduduk nasional, kontribusi ekonomi Sumatera terhadap PDB sebesar 21,94% masih jauh tertinggal dibandingkan Pulau Jawa. Sebaliknya, kontribusi daerah lain terhadap PDB nasional kurang atau hampir sama dengan proporsi penduduknya.

Hingga saat ini, upaya pemerintah mengatasi kesenjangan antar wilayah di Pulau Sumatera belum membuahkan hasil yang diharapkan. Kebijakan perekonomian selanjutnya berorientasi pada kecenderungan Pertumbuhan Berkeadilan (*Growth with Equity*). Ini terlihat jelas dalam peraturan pemerintah seperti Peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang/UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai bahwa pemerintah pusat yang berwenang akan mengambil sumber daya alam daerah untuk kemudian didistribusikan kembali ke daerah penghasil. Masih banyaknya daerah yang menghasilkan sumber daya alam namun masih memiliki tingkat ketimpangan yang cukup tinggi menunjukkan bahwa penerapannya masih dinilai bermasalah.

Indeks Williamson adalah metrik yang sangat representatif untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam pembangunan daerah. Terlepas dari kelemahannya—yaitu sensitivitasnya sehubungan dengan pengertian wilayah/regional yang dipakai dalam perhitungan *Indeks Williamson* biasanya

digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antarwilayah (Lessmann, 2014). Maka, untuk menentukan sejauh mana tingkat ketidakmerataan antar wilayah Pulau Sumatera, diterapkan metode analisis menggunakan Indeks *Williamson* (IW). *Indeks Williamson* memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1. Apabila nilai indeksnya mendekati nol, maka ketidakmerataannya tergolong rendah, sebaliknya, bila nilai indeksnya mendekati satu, berarti ketidakmerataan di wilayah tersebut tinggi. Dengan hal ini juga, *Indeks Williamson* dapat dikategorikan berdasarkan kriteria yaitu Ketimpangan Rendah (0-0,29), Ketimpangan Sedang (0,3-0,49), Ketimpangan Tinggi (0,5-1), dan Ketimpangan Sangat Tinggi (lebih dari 1).

Data tentang jumlah penduduk dan produk domestik tiap provinsi pada Pulau Sumatera diambil pada tahun 2018-2023 untuk mengetahui nilai Indeks *Williamson* (IW) di pulau Sumatera dan menganalisisnya. Hasil analisis Indeks *Williamson* informasi tersebut dapat ditemukan di Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Perkembangan Indeks Williamson Pulau Sumatera (Indeks)

Tahun	Indeks Williamson (IW)
2018	0,43 (Tingkat Ketimpangan Sedang)
2019	0,43 (Tingkat Ketimpangan Sedang)
2020	0,46 (Tingkat Ketimpangan Sedang)
2021	0,46 (Tingkat Ketimpangan Sedang)
2022	0,46 (Tingkat Ketimpangan Sedang)
2023	0,43 (Tingkat Ketimpangan Sedang)

Sumber : BPS, data diolah

Tingkat ketimpangan regional di Pulau Sumatera bervariasi dan stabil selama lima tahun, namun cenderung menurun, menurut perhitungan yang diperoleh dari Indeks *Williamson*, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan di Sumatera dalam rentang 0,43–0,46 selama periode 2018–2023, bahkan Indeks *Williamson* pulau Sumatera sempat mencapai angka yang tinggi di tahun 2020 - 2022, yaitu bernilai 0,46. Dapat disimpulkan bahwa kategori Indeks *Williamson* pada Pulau Sumatera ketimpangan sedang. Meski

harus diakui, perubahan nilai Indeks itu sendiri tidak terlalu penting. Ini mengindikasikan bahwa kabupaten dan daerah perkotaan di tiap provinsi yang terletak di Pulau Sumatera mengalami peningkatan pembangunan wilayah. Ketimpangan regional akan berkurang dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang merata.

Setiap daerah memiliki permasalahan ketimpangan pembangunan, tidak ada satupun daerah yang bebas dari ketimpangan. Hanya saja setiap daerah memiliki nilai ketimpangan wilayah yang berbeda-beda. Pulau Sumatera sendiri masih perlu memperbaiki kebijakan daerah untuk mengurangi ketimpangan wilayah di daerah mereka.

Ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera masih menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan regional. Ketimpangan ini tercermin dalam perbedaan struktur ekonomi, ketenagakerjaan, upah minimum, serta infrastruktur transportasi yang berpengaruh terhadap aksesibilitas dan daya saing daerah. Sumatera memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor pertambangan dan industri, namun tampaknya belum dimanfaatkan secara merata.

Angka Indeks Williamson di Pulau Sumatera menunjukkan nilai ketimpangan yang berbeda setiap provinsi. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karakteristik geografis masing-masing daerah dan jarak antara pusat pemerintahan dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Perbedaan wilayah disebabkan oleh kebijakan pembangunan, ketersediaan infrastruktur, dan faktor geografis. Meskipun beberapa daerah kurang berkembang, daerah lain mungkin lebih canggih dan maju lebih pesat karena kegiatan ekonomi daerah tersebut tumbuh dengan cepat serta menjadi sentra perkembangan ekonomi.

**Tabel 1.2 Rata-Rata Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)
Sektor Pertambangan Pulau Sumatera Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)**

Tahun	Rata-Rata PDRB Sektor Pertambangan Pulau Sumatera (Juta Rupiah)
2018	26.246.861,66
2019	26.475.338,82
2020	25.399.650,44
2021	25.550.913,09
2022	26.240.223,75
2023	27.030.584,26

Sumber : BPS, data diolah

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar utama dalam struktur ekonomi Indonesia, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di berbagai wilayah. Namun, peran dan kontribusi sektor ini bervariasi antar pulau, mencerminkan perbedaan dalam potensi sumber daya alam dan kebijakan pengelolaan yang diterapkan.

Di Pulau Sumatera, sektor pertambangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB, terutama di provinsi-provinsi seperti Riau, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Namun, kontribusi ini cenderung lebih seimbang dengan sektor-sektor lain seperti industri pengolahan dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi Sumatera pada triwulan III tahun 2023 tercatat sebesar 4,50% (*year-on-year*), dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 22,16% .

Sebaliknya, di Pulau Kalimantan, sektor pertambangan memiliki dominasi yang lebih kuat dalam struktur ekonomi. Provinsi Kalimantan Timur, misalnya, menyumbang 45,90% dari total PDRB Kalimantan, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor utama. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan pada periode yang sama mencapai 4,83% (*year-on-year*).

Pulau Papua juga menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan. Pada tahun 2023, sektor pertambangan dan penggalian di Papua tumbuh sebesar 19,42%, menjadikannya sektor dengan pertumbuhan tertinggi di wilayah tersebut. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Papua sangat dominan, mencapai 32,97%.

Perbandingan ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor pertambangan berperan penting di berbagai pulau, tingkat ketergantungan terhadap sektor ini berbeda-beda. Pulau Sumatera menunjukkan struktur ekonomi yang lebih diversifikasi, sementara Kalimantan dan Papua lebih bergantung pada sektor pertambangan. Hal ini memiliki implikasi terhadap ketahanan ekonomi dan ketimpangan wilayah, di mana ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertambangan dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi yang lebih besar dan ketimpangan yang lebih tajam jika tidak diimbangi dengan pembangunan sektor-sektor lain.

Wilayah barat Indonesia yang mencakup Pulau Sumatera, adalah sumber utama bahan baku energi nasional, termasuknya timah, gas, minyak bumi, dan batu bara. Pertambangan menyediakan banyak mineral berharga yang berguna bagi kelangsungan hidup manusia (*Society*, 2020). Namun, manfaat dari sektor pertambangan tampaknya tidak terdistribusi secara merata. Rata-rata PDRB sektor pertambangan di Pulau Sumatera menunjukkan fluktuasi dalam enam tahun terakhir, dengan *trend* yang relatif stabil tetapi mengalami penurunan pada 2020 dan 2021 sebelum kembali meningkat pada 2022 dan 2023. Pada 2018-2019, sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 0,87%, tetapi mengalami kontraksi cukup signifikan pada 2020 sebesar 4,06%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi *Covid-19* dan turunnya permintaan global terhadap komoditas tambang. Meski terjadi sedikit pemulihan pada 2021 dengan kenaikan 0,6%, peningkatan lebih signifikan baru terjadi pada 2022 dan 2023, dengan nilai PDRB pertambangan mencapai Rp27.030.584,26 (dalam juta rupiah) pada 2023.

Ketimpangan antarwilayah dalam sektor pertambangan di Sumatera menjadi perhatian utama, terutama karena dominasi beberapa provinsi tertentu

dalam sektor ini seperti Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau memiliki rata-rata PDRB terbesar di sektor pertambangan, yang menunjukkan bahwa perekonomian mereka sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Provinsi-provinsi ini menikmati manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan daerah lain yang tidak memiliki sumber daya tambang melimpah, seperti Bengkulu atau Bangka Belitung. Akibatnya, ketimpangan ekonomi di Sumatera semakin melebar karena adanya disparitas dalam struktur ekonomi masing-masing provinsi.

Selain itu, meskipun sektor pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB di provinsi penghasil tambang, manfaatnya tidak selalu berdistribusi secara merata dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Ketergantungan pada sektor ini juga menjadikan ekonomi daerah rentan terhadap volatilitas harga komoditas global. Jika harga komoditas turun, seperti yang terjadi pada tahun 2020, daerah yang bergantung pada pertambangan dapat mengalami perlambatan ekonomi yang lebih dalam dibandingkan wilayah dengan sektor ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Dengan demikian, meskipun pertambangan menjadi sektor unggulan di beberapa provinsi di Sumatera, ketimpangan antarwilayah tetap menjadi tantangan besar. Kebijakan yang mendorong diversifikasi ekonomi di provinsi dengan sektor pertambangan dominan, serta pemerataan investasi dan pembangunan infrastruktur di provinsi yang kurang bergantung pada pertambangan, menjadi langkah penting untuk mengurangi disparitas ekonomi di Pulau Sumatera.

Hal ini sejalan dalam penelitian (Zega *et al.*, 2022) dengan judul “Ketimpangan Pembangunan dan Konvergensi Pendapatan Antarkabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara” menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu sektor basis di beberapa kabupaten/kota. Namun, dominasi sektor ini tidak selalui berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan pada sektor pertambangan tanpa diversifikasi ekonomi dapat memperburuk ketimpangan antarwilayah.

Selain itu, untuk memperkuat variabel penelitian, (Permatasari *et al.*, 2024) dengan judul “Analisis Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antar Wilayah” penulis menyebutkan bahwa Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten yang PDRB Per Kapita-nya dihasilkan oleh sektor pertambangan (terutama batu bara). Peningkatan PDRB per kapita di daerah tersebut disebabkan oleh perbaikan harga dan produksi batu bara yang sangat baik. Artinya, peningkatan PDRB, termasuk dari sektor pertambangan, dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar provinsi di Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor pertambangan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian, tanpa distribusi yang merata aktivitas ini dapat memperburuk ketimpangan wilayah.

Membicarakan masalah ketimpangan pembangunan tentunya tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur, karena hal ini adalah faktor yang krusial dalam menangani ketimpangan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang efektif akan meningkatkan nilai tambah perekonomian, memperlancar arus barang dan jasa, serta efisien. Jalan dan infrastruktur lainnya akan mampu memberikan akses bagi individu untuk melakukan aktivitas perekonomian. Kuantitas dan kualitas jalan yang menghubungkan suatu lokasi dengan lokasi lain mempengaruhi kelancaran pergerakan mobilitas penduduk. Total panjang jalan dengan status jalan Kota atau Kabupaten 153.751 km, total jalan Provinsi di Pulau Sumatera 16.663 km, dan jalan nasional Pulau Sumatera 16.477 km. Selain itu, kondisi permukaan jalan Mantap dan Tidak Mantap pada Nasional yaitu 12.924 km & 653 km, untuk provinsi jalan Mantap 12.904 km dan Tidak Mantap 4.078 km, serta jalan Kota/Kabupaten Mantap 85.414 km dan Tidak Mantap 70.241 km hal ini dilansir pada data terakhir pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024).

**Tabel 1.3 Kondisi Permukaan Jalan & Total Ruas Jalan Pulau
Sumatera 2018-2023 (Kilometer/Km)**

Tahun	Jalan Nasional (Km)		Jalan Provinsi (Km)		Jalan Kabupaten/Kota (Km)		Total Ruas Jalan (Km)
	Mantap (Km)	Tidak Mantap (Km)	Mantap (Km)	Tidak Mantap (Km)	Mantap (Km)	Tidak Mantap (Km)	
2018	12.561	1.059	11.937	4.769	80.394	72.288	162.339
2019	12.980	730	11.672	4.991	84.049	69.937	184.359
2020	12.811	899	12.427	4.236	88.981	65.419	184.773
2021	12.940	770	12.884	3.778	94.923	60.201	185.407
2022	12.672	905	12.472	4.191	87.261	66.490	183.991
2023	12.924	653	12.904	4.078	85.414	70.241	186.212

Sumber : BPS, data diolah

Tabel menunjukkan total panjang jalan di Pulau Sumatera mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023, dengan total jalan mencapai 186.212 km pada tahun 2023. Meskipun terjadi pertumbuhan dalam infrastruktur jalan, ketimpangan wilayah tetap menjadi tantangan, terutama dalam distribusi Jalan Mantap dan Tidak Mantap di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Jumlah jalan kabupaten/kota yang tidak mantap masih cukup besar dibandingkan dengan jalan nasional dan provinsi, yang dapat mengindikasikan disparitas dalam aksesibilitas antar wilayah. Kondisi ini berpotensi memperburuk ketimpangan ekonomi, terutama bagi daerah yang bergantung pada konektivitas jalan untuk distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja. Jika infrastruktur jalan di wilayah tertentu masih kurang baik, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi lokal dan investasi di sektor-sektor produktif. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan

menjadi faktor penting dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah di Pulau Sumatera.

Infrastruktur jalan, termasuk panjang dan kondisi permukaan jalan, memainkan peran krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas tenaga kerja. Hal sejalan pada penelitian oleh (Susanto & Windyastuti, 2023) menunjukkan bahwa meskipun peningkatan panjang jalan tidak secara langsung mempengaruhi kemiskinan, infrastruktur yang baik tetap penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan.

Selain itu untuk memperkuat variabel penelitian, maka peneliti mengambil hasil dari penelitian (Al Faritzie, 2021) dengan judul “Analisis Pengukuran Derajat Kejenuhan dan Tingkat Pelayanan Ruas R.Sukanto Kota Palembang” bahwasanya jalan menghasilkan bahwa kondisi jalan yang buruk dapat menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi. Meskipun fokus penelitian ini adalah pada ruas jalan tertentu di Kota Palembang, temuan ini relevan untuk memahami bagaimana kondisi jalan memengaruhi ketimpangan wilayah.

Ketimpangan wilayah juga memiliki kaitan erat dengan masalah ketenagakerjaan. Kemerataan pembangunan perekonomian sebuah negara tidak bisa dipisahkan dari kontribusi manusia dalam manajemennya, di mana manusia berfungsi sebagai pekerja, masukan dalam pengembangan, dan pengguna hasil pembangunan tersebut. Secara potensial, daerah Sumatera mempunyai kapasitas tenaga manusia yang cukup untuk ditingkatkan.

**Tabel 1.4 Rata-Rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Pulau Sumatera Tahun 2018-2023 (Persentase(%))**

Tahun	Rata-Rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pulau Sumatera (Persentase (%))
2018	67,80
2019	67,12
2020	67,95
2021	67,48
2022	67,95
2023	68,73

Sumber : BPS, data diolah

Tabel menunjukkan fluktuasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Sumatera dari tahun 2018-2023, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 68,73%. Meskipun terdapat kenaikan, angka ini belum mencerminkan pemerataan kesempatan kerja di seluruh wilayah Sumatera. Ketimpangan wilayah masih dapat terjadi jika daerah dengan akses ekonomi yang lebih baik memiliki TPAK yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang infrastrukturnya kurang berkembang. Selain itu, faktor lain seperti sektor unggulan di tiap provinsi, investasi industri, dan pendidikan tenaga kerja turut memengaruhi ketimpangan dalam partisipasi angkatan kerja. Jika tidak ada kebijakan yang mendukung pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja di daerah tertinggal, maka ketimpangan antarwilayah di Pulau Sumatera dapat semakin lebar meskipun TPAK mengalami peningkatan. Selain itu, Kenaikan produksi yang disini diartikan sebagai pendapatan per kapita yang diperoleh tenaga kerja yang bekerja, akan diakibatkan oleh kenaikan TPAK tersebut (Darzal, 2016).

Hal ini sejalan dengan penelitian & memperkuat variabel hasil kajian oleh (Manza, 2024) dengan judul “Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2023 Dalam Perspektif Ekonomi Islam” menemukan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan TPAK dapat mengurangi tingkat kemiskinan, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan ketimpangan pendapatan antarwilayah.

Selain itu, memperkuat variabel penelitian diambil dari (Manurung, 2022) dengan judul “Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-Wanita) di Provinsi Sumatera Utara” menghasilkan bahwa variabel upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK wanita. Meskipun studi ini berfokus pada partisipasi angkatan kerja wanita, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan upah yang tepat dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja, yang selanjutnya dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dan ketimpangan wilayah. Oleh karena itu, tingkat partisipasi

angkatan kerja (TPAK) juga menjadi determinan penting dalam ketimpangan regional. Provinsi dengan TPAK tinggi cenderung memiliki produktivitas ekonomi yang lebih baik, sementara daerah dengan TPAK rendah mungkin menghadapi tantangan dalam memanfaatkan potensi tenaga kerja mereka secara optimal.

Karena tingkat upah mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, maka seorang pekerja harus menerima pembayaran atas tenaga kerjanya (Armidi *et al.*, 2018). Selain itu, tingkat upah juga merupakan kunci dari suksesnya pemerataan pembangunan. Ketimpangan dapat dikurangi dengan upah minimum. Distribusi pendapatan dan penghasilan yang lebih tinggi dan adil akan dihasilkan dari penetapan upah minimum dan standar upah yang lebih tinggi (Bluestone, Barry; Harrison, 2001).

Tabel 1.5 Rata-Rata Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Regional (UMP/UMR) Pulau Sumatera 2018-2023 (Juta Rupiah)

Tahun	Rata-Rata Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Regional (UMP/UMR) Pulau Sumatera (Juta Rupiah)
2018	2.316.065
2019	2.504.921
2020	2.736.420
2021	2.736.420
2022	2.792.729
2023	3.023.474

Sumber : BPS & Kementerian Ketenagakerjaan 2023, data diolah

Rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Sumatera mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2023, meskipun dengan laju yang bervariasi. Pada periode 2018-2019, kenaikan UMP mencapai sekitar 8,2%, kemudian meningkat lebih lanjut sebesar 9,2% pada 2019-2020. Namun, pada 2021, UMP stagnan di angka Rp2.736.420, yang mencerminkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kebijakan pengupahan. Setelahnya, kenaikan kembali terjadi pada 2022 dan 2023, dengan lonjakan yang lebih signifikan pada 2023 sebesar 8,3% (Badan Pusat Statistik, 2024). Peningkatan UMP yang

tidak merata di antara provinsi-provinsi di Sumatera berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah. Daerah dengan sektor ekonomi dominan seperti industri dan pertambangan cenderung memiliki UMP yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan sektor ekonomi berbasis pertanian dan perikanan. Ketimpangan ini dapat berdampak pada daya beli masyarakat, distribusi tenaga kerja, dan migrasi ekonomi antar daerah.

Selain itu, stagnasi UMP pada 2021 menunjukkan bagaimana faktor eksternal seperti pandemi dapat mempengaruhi kebijakan ketenagakerjaan dan distribusi pendapatan antarwilayah. Jika suatu daerah memiliki ketergantungan tinggi pada sektor yang terdampak lebih parah oleh krisis ekonomi, maka pertumbuhan upah di wilayah tersebut dapat tertahan, memperlebar kesenjangan dengan daerah yang lebih *resilient* secara ekonomi.

Ketimpangan upah minimum juga berimplikasi pada ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi regional. Daerah dengan UMP tinggi cenderung memiliki tingkat konsumsi dan investasi yang lebih baik, sementara daerah dengan UMP lebih rendah mungkin menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemerintah menerapkan upaya perlindungan ini untuk menjauhkan individu dari kemiskinan. Peningkatan upah minimum secara tidak langsung dapat mendorong peningkatan kesejahteraan di Pulau Sumatera, karena semakin tinggi upah atau pendapatan yang semakin besar mengakibatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan konsumsi turut semakin besar, hal ini akan meningkatkan laju pertumbuhan dan derajat kesejahteraan masyarakat (Darzal, 2016). Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Sumatera, perlu ada kebijakan yang tidak hanya berfokus pada kenaikan upah, tetapi juga pemerataan akses terhadap investasi, infrastruktur, dan kesempatan kerja untuk mengurangi disparitas wilayah.

Ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan infrastruktur. Salah satunya adalah upah minimum regional/upah minimum provinsi (UMR/UMP), yang memiliki peran signifikan dalam distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan

Penelitian (Manullang *et al.*, 2024) dengan judul “Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Sumatera Utara” menemukan bahwa UMR berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, dimana peningkatan UMR dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, penetapan UMR yang tidak seimbang antarprovinsi dapat memperburuk ketimpangan ekonomi di wilayah tersebut.

Untuk memperkuat variabel penelitian maka mengambil hasil kajian penelitian oleh (Putri, 2020) dengan judul “Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera” menghasilkan bahwa UMP memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi Sumatera, yang berarti peningkatan UMP dapat membantu mengurangi ketimpangan tersebut. Namun, penetapan UMP yang tidak seragam antarprovinsi berpotensi memperburuk disparitas ekonomi di wilayah ini.

Salah satu indikator ketimpangan yang mencolok adalah perbedaan dalam kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2024), rata-rata PDRB sektor pertambangan di Pulau Sumatera pada tahun 2023 mencapai Rp27.030.584,26 (dalam juta rupiah), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya serta lima tahun terakhir. Provinsi dengan kontribusi tertinggi adalah Sumatera Selatan Rp82.639.010,67 (dalam juta rupiah), disusul oleh Riau Rp80.730.220,48 (dalam juta rupiah), dan Jambi Rp36.260.608,69 (dalam juta rupiah). Sementara itu, Bangka Belitung dan Bengkulu mencatat PDRB sektor pertambangan terendah, masing-masing Rp6.406.137,52 (dalam juta rupiah) dan Rp1.713.097,96 (dalam juta rupiah). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan hanya terkonsentrasi di beberapa provinsi tertentu, yang berimplikasi pada perbedaan dalam tingkat investasi, kesejahteraan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi regional.

Selain faktor ekonomi, ketimpangan juga tampak dalam Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2024), rata-rata TPAK di Pulau Sumatera tahun 2023 sebesar 68,73% mengalami

peningkatan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 67,95%. Provinsi dengan TPAK tertinggi adalah Sumatera Utara 71,06%, diikuti oleh Bengkulu 70,91%, dan Sumatera Selatan 70,72%. Sebaliknya, Riau memiliki TPAK terendah di Sumatera, yaitu, 64,45%. Perbedaan ini dapat mencerminkan kondisi sektor tenaga kerja di masing-masing provinsi, di mana daerah dengan industri manufaktur, jasa, dan perkotaan yang lebih berkembang cenderung memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor primer seperti pertanian dan pertambangan.

Dari sisi kesejahteraan tenaga kerja, upah minimum di Pulau Sumatera juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Berdasarkan data (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024), rata-rata upah minimum Sumatera pada tahun 2023 sebesar Rp3.023.474, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional Rp2.923.309. Provinsi dengan upah minimum tertinggi adalah Bangka Belitung Rp3.498.479, Aceh Rp3.413.666, dan Sumatera Selatan Rp3.404.177. Sebaliknya, provinsi dengan upah minimum terendah adalah Lampung Rp2.633.284 dan Bengkulu Rp2.418.280. Perbedaan ini mencerminkan disparitas dalam produktivitas tenaga kerja, kebijakan pengupahan, serta daya saing ekonomi di masing-masing daerah.

Selain faktor ekonomi dan ketenagakerjaan, ketimpangan wilayah juga dipengaruhi oleh infrastruktur, khususnya jaringan jalan yang mendukung konektivitas antar-provinsi, antar-kota, dan antar-kabupaten. Berdasarkan data (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), 2024), panjang jalan nasional dengan kondisi mantap tertinggi terdapat di Sumatera Utara 2.468 km, Aceh 2.066 km, dan Sumatera Selatan 1.535 km. Namun beberapa provinsi masih memiliki jalan nasional yang tidak mantap, dengan Sumatera Utara 152 km, Sumatera Barat 100 km, dan Jambi 92 km sebagai provinsi dengan jalan nasional tidak mantap tertinggi.

Ketimpangan yang lebih besar terlihat pada jalan provinsi. Sumatera Utara memiliki jalan provinsi tidak mantap terpanjang 15.951 km, disusul oleh Riau 9.643 km, dan Lampung 9.349 km. Namun, provinsi dengan jalan provinsi

mantap terpanjang adalah Sumatera Utara 19.762 km, Sumatera Barat 11.790 km, dan Aceh 10.731 km.

Kondisi jalan kabupaten/kota juga memperlihatkan ketimpangan yang signifikan. Provinsi dengan jalan kabupaten/kota dalam kondisi mantap tertinggi adalah Sumatera Utara 19.762 km, Sumatera Barat 11.790 km, dan Aceh 10.731 km. Namun, terdapat pula provinsi dengan jalan kabupaten/kota tidak mantap tertinggi, yaitu Sumatera Utara 15.591 km, Riau 9.643 km, dan Lampung 9.349 km.

Secara keseluruhan, berdasarkan data BPS & Kementerian PUPR (PUPR, 2024), rata-rata panjang jalan nasional yang mantap pada tahun 2023 mencapai 12.924 km, sedangkan jalan nasional tidak mantap sebesar 653 km. Sementara itu, total jalan provinsi mantap mencapai 85.414 km, sementara jalan tidak mantap mencapai 70.241 km. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pembangunan infrastruktur jalan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun ketimpangan masih terjadi antar-provinsi.

Ketimpangan dalam infrastruktur jalan ini memiliki dampak yang luas, terutama dalam konektivitas antarwilayah. Provinsi yang memiliki jalan dengan kondisi mantap cenderung lebih kompetitif dalam menarik investasi, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Sebaliknya, provinsi dengan jalan yang tidak mantap menghadapi tantangan dalam pengembangan ekonomi lokal, distribusi hasil produksi, serta pemerataan pembangunan.

Dengan demikian, data yang telah disajikan menunjukkan bahwa Pulau Sumatera mengalami ketimpangan dalam berbagai aspek pembangunan, baik dalam sektor ekonomi, ketenagakerjaan, maupun infrastruktur jalan. Ketimpangan dalam sektor pertambangan menunjukkan adanya konsentrasi ekonomi di beberapa provinsi tertentu. Perbedaan dalam TPAK dan Upah Minimum mengindikasikan ketidakseimbangan dalam kesempatan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Sementara itu, ketimpangan dalam infrastruktur jalan mencerminkan disparitas dalam aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih merata untuk

mengurangi kesenjangan pembangunan di Pulau Sumatera agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penekanan tingkat ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera dapat didorong oleh berbagai variabel-variabel seperti PDRB sektor pertambangan, ruas jalan mantap, ruas jalan tidak mantap, TPAK, dan upah minimum dengan kurun waktu 2018-2023, maka diperlukan penelitian mengenai analisis berbagai faktor yang memengaruhi ketimpangan antar wilayah di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, mengangkat judul **“Pengaruh PDRB Sektor Pertambangan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Dan Kualitas Infrastruktur Jalan Terhadap Ketimpangan Wilayah Sumatera”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan *fenomena gap* pada tahun 2022-2023, ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi, tercermin dalam Indeks Williamson yang mencapai 0,43 pada tahun 2023, sedikit menurun dari 0,45 pada tahun 2022 (BPS, 2024b). Meskipun demikian, penurunan ini belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan ekonomi, mengingat masih tingginya disparitas pada variabel-variabel penentu seperti Upah Minimum, Aktivitas Sektor Pertambangan (PDRB sektor pertambangan), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), serta ruas jalan dan kondisi permukaan jalan. Misalnya, perbedaan signifikan dalam PDRB sektor pertambangan antara Sumatera Selatan dan Bengkulu, serta variasi upah minimum tertinggi di Bangka Belitung dan terendah di Bengkulu, menandakan ketidakmerataan distribusi potensi ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja antarprovinsi. Selain itu, kondisi infrastruktur jalan yang belum merata terlihat dari masih tingginya ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang tidak mantap menghambat aksesibilitas dan konektivitas ekonomi, sehingga menimbulkan kesenjangan pertumbuhan di berbagai wilayah Pulau Sumatera.

Fenomena ini sejalan dengan teori ketimpangan wilayah yang dikemukakan oleh Sjafrizal dalam bukunya, yang menekankan bahwa konsentrasi sumber daya dan investasi di beberapa titik pertumbuhan akan memicu disparitas

antardaerah. Dengan kata lain, meskipun Indeks Williamson menurun, fakta di lapangan masih menunjukkan ketimpangan ekonomi akibat perbedaan daya saing, struktur ekonomi, dan kualitas infrastruktur. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai determinan ketimpangan wilayah dengan variabel upah minimum, PDRB sektor pertambangan, TPAK, serta ruas jalan mantap & kondisi ruas jalan tidak mantap menjadi penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Pulau Sumatera

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, serta pemaparan masalah penelitian, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat perkembangan ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera tahun 2018-2023 ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB sektor pertambangan, ruas jalan mantap, ruas jalan tidak mantap, TPAK, dan upah minimum terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera rentang tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut maksud atau sasaran penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat atau skala nilai disparitas regional atau perbedaan wilayah provinsi atau wilayah administratif di Pulau Sumatera rentang tahun 2018-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB sektor pertambangan, panjang jalan/ruas jalan mantap & tidak mantap, TPAK, dan upah minimum terhadap ketimpangan wilayah di Kawasan Sumatera rentang tahun 2018-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan, oleh karena itu, riset ini diharapkan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Meningkatkan pemahaman mengenai studi disparitas wilayah di Pulau Sumatera, serta diasumsikan penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dalam area ekonomi, khususnya dalam ekonomi pembangunan dan ekonomi regional.
- b. Menyumbangkan kontribusi ide kepada otoritas dalam menangani ketimpangan wilayah di pulau Sumatera. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi dan sumber informasi bagi studi-studi yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

Dapat dijadikan sebagai satu diantara pemikiran penting bagi otoritas saat merumuskan strategi yang bertujuan guna mengatasi & menangani perbedaan regional atau disparitas wilayah yang terjadi di kawasan Sumatera.